

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perluasan ekonomi suatu negara merupakan barometer yang dapat diandalkan dari kemajuan bangsa itu secara keseluruhan. Mustahil untuk menempatkan jumlah yang cukup penting pada peran yang dimainkan lembaga keuangan dalam ekonomi yang berkembang dengan kecepatan tinggi. Ada dua kategori lembaga keuangan yang berbeda di Indonesia, yaitu lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank.

Keputusan Menteri Keuangan 280/KMK.01/1989 tentang dana masyarakat Indonesia dapat berasal dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Di Provinsi Bali, ada semacam lembaga keuangan yang dikenal dengan Lembaga Perkreditan Desa. Lembaga ini dikelola oleh masyarakat adat. Pendirian ini masing-masing memiliki kualitas yang berbeda. SK Gubernur No. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali merupakan pendorong awal berdirinya LPD pada tahun 1984. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengatur keberadaan LPD. Peraturan ini kemudian digantikan oleh Peraturan Daerah

Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, sehingga peraturan tersebut tidak berlaku lagi.

Lembaga Perkreditan Desa di Bali adalah lembaga keuangan yang merupakan bagian dari Desa Pakraman dan berkantor pusat di Wewidangan Desa Pakraman. LPD didirikan di Bali dengan tujuan membantu penduduk setempat dalam mengembangkan berbagai usaha bisnis mereka. Lembaga Perkreditan Desa melapor ke desa adat setempat, yang juga berfungsi sebagai pengawas lembaga. Organisasi ini juga didukung oleh seorang ketua, sekretaris, dan bendahara, serta dapat ditambah dengan sejumlah kepala seksi dan staf sesuai dengan kebutuhan LPD daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten (LPD) telah didirikan di Bali dengan tujuan membantu penduduk di wilayah Provinsi Bali dalam pengembangan usaha ekonomi mereka sendiri. (Gunawan, 2011).

Desa Pakraman adalah rumah bagi sejumlah bank dan organisasi keuangan lainnya yang dikenal sebagai Lembaga Perkreditan Desa. Ini telah berkembang selama bertahun-tahun dan sekarang menawarkan kepada para anggotanya berbagai manfaat di berbagai bidang, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Suartana (2009), peran LPD adalah menjalankan fungsi intermediasi dengan bertindak sebagai saluran penerimaan simpanan dan penyaluran kredit, terutama ke arah dan dari masyarakat. LPD diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan karena tujuannya adalah memberikan peluang usaha bagi penduduk desa setempat, menampung pekerja desa, memperlancar lalu lintas pembayaran, dan menghilangkan keberadaan rentenir. Selain itu, LPD akan

menampung tenaga kerja pedesaan. Mengingat betapa pentingnya keberadaan LPD, maka pengembangan dan tingkat fungsinya perlu terus ditingkatkan.

Kinerja merupakan gambaran pencapaian keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dalam proses pemenuhan tujuan perusahaan. Kinerja lembaga perkreditan desa sebagai badan usaha perlu terus dievaluasi karena dikelola berdasarkan prinsip-prinsip umum perusahaan. Penting juga untuk dicatat bahwa kinerja dikendalikan berdasarkan prinsip. Korporasi berkewajiban untuk secara teratur menganalisis dan meningkatkan kinerjanya untuk memastikan bahwa bisnis akan terus beroperasi dengan sukses di masa mendatang. Kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian kerja merupakan indikator kinerja.

Divisi Pertanahan dan Properti (LPD) menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan yang lugas dan konsisten dengan konteks di mana LPD didirikan. Aturan-aturan ini lebih mudah dipahami. Pendistribusian uang tersebut diatur sebagai berikut sesuai dengan Keputusan Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyetoran dan Penggunaan Laba Bersih LPD yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali Bali: 60 persen untuk Cadangan Modal, 20 persen untuk Desa. Dana Pembangunan, 10 persen untuk Jasa Produksi, 5 persen untuk Dana Pembangunan, Pengawasan, dan Perlindungan, dan 5 persen untuk Dana Sosial. LPD menyerahkan dua puluh persen dari laba bersih tahunannya untuk dana pembangunan desa dan lima persen untuk dana sosial dalam bentuk uang (uang segar) untuk mendukung pembangunan desa di Bali. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban pembangunan desa kepada masyarakat. Karena LPD telah ada

untuk waktu yang cukup lama, adalah mungkin untuk menyimpulkan bahwa ini adalah salah satu keuntungan nyata yang dihasilkan dari pelaksanaannya. selain kontribusi yang dibuat untuk rekening dana sosial (Sundarianingsih, 2014).

Lembaga perkreditan desa selama ini hanya berbasis pada metode konvensional yang sebagian besar berfokus pada masalah keuangan. Teknik ini cacat dalam beberapa hal, antara lain sebagai berikut: 1) Mendorong manajer untuk mengambil tindakan jangka pendek, yang menyebabkan mereka tidak memperhatikan kepentingan jangka panjang; 2) Menyebabkan manajer mengabaikan aspek non-keuangan dan aset tidak berwujud yang memberikan wawasan, yang menyebabkan manajer salah memahami perusahaan di masa sekarang dan masa depan; dan 3) Kinerja keuangan hanya mengandalkan kinerja masa lalu, yang tidak membawa perusahaan pada target yang diinginkan (Suartana, 2009:3). Diyakini bahwa kegagalan LPD untuk bersaing dengan lembaga keuangan lain dipengaruhi oleh penggunaan metode pemantauan kinerja konvensional yang terus berlanjut.

Salah satu lembaga keuangan yang misinya menawarkan jasa keuangan kepada masyarakat yang berada di dalam wilayah desa adat dikenal dengan nama lembaga perkreditan desa. Agar sukses di pasar, Lembaga Perkreditan Desa, BPR, dan Koperasi perlu melakukan perhitungan non-keuangan. Lembaga perkreditan di desa dijalankan secara mandiri menurut adat desa, sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan keagenan. Menurut Shil (2008:27), konflik keagenan terjadi ketika karyawan di tingkat yang berbeda dalam perusahaan mengorbankan

tujuan perusahaan untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Agar jarak antara agen dan prinsipal sekecil mungkin, diperlukan manajemen bisnis yang baik.

Bank pembangunan daerah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang tidak hanya berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik tetapi juga menganut prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di antara para kreditur lembaga perkreditan daerah. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang perlu diterapkan oleh LPD untuk mengurangi jumlah konflik kepentingan yang dapat timbul antara pengelola LPD dalam perannya sebagai agen dan pemilik, seperti tata krama desa, dan antara pengelola LPD dengan kreditur, seperti BPD Bali, selain menjaga hubungan yang positif dan positif. Hal inilah yang perlu dilakukan oleh LPD untuk mengurangi banyaknya konflik kepentingan yang dapat timbul antara pengelola LPD dalam perannya sebagai agen dan pemilik. menjamin terpenuhinya hak-hak semua pihak yang berkepentingan terhadap fungsi dan tujuan LPD itu sendiri. Peningkatan kepercayaan di antara nasabah LPD dimungkinkan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Penerapan GCG akan menghilangkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kegiatan yang dilakukan untuk keuntungan sendiri, yang akan berdampak pada peningkatan nilai LPD. Selain itu, ini akan menghilangkan kesalahan dalam kegiatan yang dilakukan untuk keuntungan mereka sendiri. Tata kelola perusahaan yang baik, yang mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, dan efisien, merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan dan mengoptimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadikannya salah satu elemen terpenting dalam

memperluas dan mengoptimalkan nilai perusahaan (Andrianto dan Firmansyah, 2019).

Untuk memperkuat interaksi antara manajemen dan investor, perlu diterapkan GCG. Jika sebuah perusahaan memiliki sistem GCG yang efisien, manajemen akan lebih mungkin untuk menjalankan wewenangnya secara bertanggung jawab dan bekerja untuk kebaikan bisnis (Nurchayani, et al. 2013). Menurut Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (2006:5) di bawah GCG, ada lima prinsip yang harus dianut oleh sebuah organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: (1) keterbukaan dan kejujuran, (2) akuntabilitas dan tanggung jawab, (3) kemandirian, (4) ketidakberpihakan, dan (5) keadilan atau kesetaraan.

Penelitian yang berfokus pada GCG memberikan bukti empiris bahwa variabel GCG merupakan faktor penting dalam menentukan nilai perusahaan dan mempengaruhi kinerja keuangan organisasi seperti LPD. Penelitian ini memberikan bukti bahwa variabel GCG merupakan faktor penting dalam menentukan nilai perusahaan dan mempengaruhi kinerja keuangan. LPD dapat lebih mudah menentukan visi dan misinya dengan bantuan struktur yang disediakan oleh Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang juga berfungsi sebagai cara memilih ukuran pemantauan kinerja. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik memastikan bahwa profitabilitas dan keamanan aset yang diinvestasikan di LPD tidak akan disalahgunakan oleh pengelola LPD tersebut.

Penelitian ini membahas tentang LPD di Kabupaten Gianyar, karena memperoleh laba tertinggi dibandingkan Kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali. Berikut merupakan Tabel 1.1 perolehan laba pada tiap Kabupaten adalah.

**Tabel 1.1**  
**Perolehan Laba masing-masing Kabupaten**  
**di Provinsi Bali**

No	Kabupaten	Laba
1.	Jembrana	Rp. 18.867.077.000
2.	Tabanan	Rp. 41.410.612.000
3.	Badung	Rp. 75.974.785.000
4.	Gianyar	Rp. 85.496.103.000
5.	Klungkung	Rp. 31.709.202.000
6.	Bangli	Rp. 33.696.983.000
7.	Karangasem	Rp. 34.668.029.000
8.	Buleleng	Rp. 33.031.553.000
9.	Denpasar	Rp. 43.512.683.000

Sumber: LPLPD Provinsi Bali, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa LPD di Kabupaten Gianyar memiliki laba sebesar Rp. 85.496.103.000. Lembaga Perkreditan Desa sangat vital bagi kesehatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan karena keterlibatannya dalam distribusi uang tunai ke seluruh wilayah. Menurut informasi yang diberikan oleh LPLPD Gianyar, terdapat 270 LPD yang berada di Kabupaten Gianyar; Namun, dari jumlah itu, ada 17 LPD yang tidak aktif. Manajemen yang buruk adalah akar penyebab ketidakmampuan LPD untuk berfungsi, yang mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit dan mengalami krisis kepercayaan. Salah satu faktornya yaitu adanya konflik internal di LPD. Terkait permasalahan eksternal bahwa problem terbesar yang dialami belasan LPD di Gianyar

dikarenakan banyaknya nasabah yang tidak mampu membayar kredit akibat krisis ekonomi dan dampak pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan kredit macet.

Kabupaten Gianyar merupakan daerah berkembang yang berdampak pada perubahan baik lingkungan fisik maupun sosial ekonomi, dan perubahan tersebut dipandang berpotensi untuk mengarah pada pembangunan lebih lanjut. Sangat penting untuk memiliki perangkat dan kelembagaan daerah yang mampu membantu masyarakat lokal dan diharapkan memiliki modal untuk menghadapi setiap perubahan yang terjadi sebagai akibat dari proses pembangunan. Hal ini akan memungkinkan untuk mengantisipasi hal-hal negatif sebagai akibat dari proses tersebut. Salah satu perangkat kelembagaan daerah yang bermanfaat bagi perekonomian kota pedesaan adalah Pengembangan Masyarakat Daerah (LPD). Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam kepemimpinan LPD sangat signifikan karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi LPD, memungkinkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan memungkinkan pengelolaan LPD yang lebih baik, yang semuanya akan menghasilkan peningkatan kinerja dari LPD. Penerapan prinsip-prinsip GCG akan mewujudkannya. (Krismaya, 2014). Menurut Daniri (2015:14), jika perusahaan berhasil dan konsisten dalam penerapan mekanisme penerapan GCG, akan dapat memberikan beberapa keuntungan, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: (1) mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh instansi, yang disebut sebagai biaya yang perlu dikeluarkan ditanggung oleh pemegang saham sebagai akibat dari pelimpahan kekuasaan kepada pengurus; (2) mengurangi biaya modal (cost of capital); (3) meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik



dalam jangka panjang; dan (4) mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di perusahaan.

Banyak penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menyelidiki pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan, dengan menggunakan berbagai setting penelitian; namun, semua studi ini menghasilkan kesimpulan yang bertentangan. Berdasarkan hasil penelitian Mahendrayasa dan Putri (2017), akuntabilitas, independensi, dan fairness memiliki pengaruh yang menguntungkan dan signifikan, namun tanggung jawab dan transparansi tidak berpengaruh. Hapsari dan Wiratmaja (2018) menemukan bahwa hanya transparansi yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan LPD, sedangkan prinsip-prinsip GCG lainnya tidak berpengaruh. Ini khusus dalam pengaturan LPD. Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyaswari dan Putri (2016) dan Prasinta (2012) menemukan bahwa prinsip-prinsip GCG hanya berpengaruh positif terhadap kinerja operasional. Namun, Prasinta (2012) menemukan bahwa penerapan GCG masih kurang dalam hal pencapaian laba perusahaan dan respon pasar. Akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan semuanya ditemukan memiliki efek yang menguntungkan oleh Handayani et al. (2020), sedangkan transparansi ternyata tidak berpengaruh.

Ketidak konsistenan temuan empiris tentang pengaruh GCG terhadap kinerja LPD maka perlu dilakukan penelitian kembali, khusus di Kabupaten Gianyar. Hal ini karena, penelitian-penelitian sebelumnya tentang kinerja LPD hanya berdasarkan pendekatan tradisional dengan fokus pada keuangan (*financial*) saja tanpa mempertimbangkan peran GCG dalam menjelaskan kinerja LPD.

Penelitian tentang pengaruh GCG terhadap kinerja LPD penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan bersaing secara berkelanjutan dalam jangka panjang, karena bank umum seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan BPR baru saja mulai memperluas operasinya ke daerah pedesaan. Prinsip-prinsip GCG sangat dibutuhkan dalam institusi untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan uraian di atas, maka penting dilakukan penelitian yang dirumuskan dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja LPD menjadi penting, khususnya di LPD Kabupaten Gianyar, agar LPD mampu bersaing tidak hanya dengan memperhatikan keuangan, tetapi juga dengan memperhatikan prinsip Nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan semuanya saling terkait meningkatkan daya saing jangka panjang dan keberlanjutan LPD. Hal ini akan memungkinkan LPD untuk bersaing dengan LPD lainnya tidak hanya dengan memperhatikan keuangan, tetapi juga dengan memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, dimana potensi penuh dari prinsip-prinsip GCG belum diwujudkan melalui implementasinya, yang menyebabkan peningkatan potensi untuk penipuan dalam pelaporan keuangan. Karena LPD harus mendapatkan dana dari konsumen untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, sikap skeptis dari nasabah tersebut menjadi kendala yang cukup berarti. Fakta bahwa manajemen dan badan pengawas memiliki kepentingan yang

terpisah dari kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, yang memungkinkan terjadinya beberapa jenis pelaporan keuangan yang tidak jujur.

Saat ini terdapat 17 LPD yang tidak berfungsi akibat tata kelola LPD yang tidak memadai. Selain itu, ada kasus pekerja LPD yang melakukan perilaku korupsi, yang menyebabkan kerugian finansial bagi LPD di Kabupaten Gianyar. Akibat sengketa hukum tersebut, tidak hanya terjadi penurunan kerugian finansial, tetapi juga terjadi penurunan kepercayaan masyarakat.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk fokus pada masalah yang harus ditangani, penting untuk membatasi ruang lingkup masalah; Oleh karena itu, penelitian ini membatasi hal-hal sebagai berikut: (1) Penelitian dilakukan di LPD Kabupaten Gianyar; (2) penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik terhadap kinerja LPD Kabupaten Gianyar periode awal tahun 2020; dan (3) fokus utama penelitian ini adalah pada lima prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja LPD di Kabupaten Gianyar?
- 2) Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja LPD di Kabupaten Gianyar?

- 3) Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja LPD di Kabupaten Gianyar?
- 4) Bagaimana pengaruh responsibilitas terhadap kinerja LPD di Kabupaten Gianyar?
- 5) Bagaimana pengaruh independensi terhadap kinerja LPD di Kabupaten Gianyar?
- 6) Bagaimana pengaruh kewajaran terhadap kinerja LPD di Kabupaten Gianyar?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja LPD di Kabupaten Gianyar
- 2) Pengaruh transparansi terhadap kinerja LPD di Kabupaten Gianyar
- 3) Pengaruh akuntabilitas terhadap Kinerja di Kabupaten Gianyar
- 4) Pengaruh responsibilitas terhadap kinerja LPD di Kabupaten Gianyar
- 5) Pengaruh independensi terhadap kinerja LPD di Kabupaten Gianyar
- 6) Pengaruh kewajaran terhadap kinerja LPD di Kabupaten Gianyar

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman praktis dan teoritis tentang kinerja LPD bagi akademisi, pengelola LPD dan pemerintah.

### 1.6.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris tentang pengaruh GCG terhadap kinerja LPD.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, temuan Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif bahwa kinerja LPD dapat dijelaskan dengan unsur-unsur GCG.
- b. Pengelola LPD, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi tentang perlunya mempertimbangkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dalam menjelaskan kinerja LPD. Hal ini penting karena kinerja tidak hanya tergantung dari rasio-rasio keuangan tetapi bagaimana GCG diterapkan untuk meningkatkan kinerja LPD secara berkesinambungan.
- c. Pemerintah, menggunakan temuan kajian sebagai landasan pertimbangan dalam penetapan strategi dan materi pembinaan yang tepat bagi pengelola LPD dalam meningkatkan GCG dan kinerja bisnis.